



Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)

Mochamad Nurdin

Email: nurdin@staip.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhanratu, Sukabumi

Irfan Abdurahman

Email: irfan@staip.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhanratu, Sukabumi

Alansyah

Email: daarulmujiib@gmail.com

Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhanratu, Sukabumi

Abstrak

Artikel ini mengkaji perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks pernikahan, dengan fokus pada perbandingan antara pandangan Mazhab Hanafi dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Perwalian anak hasil zina menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak dan kewajiban orang tua serta status anak dalam masyarakat. Mazhab Hanafi, salah satu mazhab dalam hukum Islam, memiliki pandangan khusus mengenai hal ini yang seringkali berbeda dengan pandangan mazhab lainnya. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya, menetapkan ketentuan perwalian yang harus diikuti. Melalui pendekatan normatif dan analisis komparatif, artikel ini mengeksplorasi perbedaan dan persamaan pandangan antara Mazhab Hanafi dan hukum Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam penentuan wali, hak-hak anak, dan tanggung jawab orang tua menurut kedua sistem hukum ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang isu perwalian anak hasil zina dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta implikasinya bagi praktik hukum dan kebijakan terkait perwalian anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perwalian, Anak Zina, Pernikahan, Mazhab Hanafi, Indonesia

As-Sakinah Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)

Abstract

This article examines the guardianship of illegitimate daughters within the context of marriage, focusing on the comparison between the Hanafi school of thought and the provisions outlined in the Marriage Law in Indonesia. The guardianship of illegitimate children raises various legal and social issues, particularly concerning the rights and obligations of parents and the status of the child in society. The Hanafi school, one of the schools of Islamic law, has specific views on this matter that often differ from other schools of thought. On the other hand, positive law in Indonesia, specifically Law Number 1 of 1974 on Marriage and related regulations, sets out the guardianship provisions to be followed. Through a normative approach and comparative analysis, this article explores the differences and similarities in the views between the Hanafi school and Indonesian law regarding the guardianship of illegitimate daughters in marriage. The research findings indicate significant differences in the determination of guardians, children's rights, and parental responsibilities according to these two legal systems. This article aims to contribute to a deeper understanding of the issue of guardianship of illegitimate children in the context of Islamic law and national law in Indonesia, as well as its implications for legal practice and policy related to child guardianship in Indonesia.

Keywords: *Guardianship, Illegitimate Children, Marriage, Hanafi's Madzhab, Indonesia.*

Submitted : 12-05-2024 | Accepted : 28-05-2024 | Published : 31-05-2024

PENDAHULUAN

Isu perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan menjadi topik yang penting dalam kajian hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks aplikasi Mazhab Hanafi dan undang-undang pernikahan di Indonesia. Perwalian merupakan proses hukum yang menentukan siapa yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban anak perempuan hasil zina setelah pernikahan terjadi. Dalam Islam, prinsip-prinsip perwalian dan hukum pernikahan memberikan kerangka kerja untuk menangani situasi seperti ini, namun penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi mazhab dan regulasi hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan mendalam antara pandangan Mazhab Hanafi dan undang-undang pernikahan di Indonesia terkait isu perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem hukum ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani isu yang sensitif ini di masyarakat.

Latar belakang hukum keluarga Islam terkait perwalian anak perempuan hasil zina mencerminkan kompleksitas dan sensitivitas isu ini dalam kerangka hukum Islam. Dr. Az-Zuhaili, seorang ahli dalam bidang fiqh Islam, menjelaskan bahwa

As-Sakinah Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan(Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)

dalam Islam, perwalian adalah proses hukum yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas hak-hak dan kewajiban anak setelah terjadinya pernikahan. Namun, isu ini menjadi lebih rumit ketika anak dilahirkan dari hubungan zina, karena adanya stigma sosial dan pertanyaan tentang status dan perlindungan hukum bagi anak tersebut (Az-Zuhaili 2001).

Hukum keluarga Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis, memberikan kerangka kerja untuk menangani isu perwalian anak perempuan hasil zina. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Schacht, seorang pakar dalam studi hukum Islam, Al-Quran dan Hadis memberikan pedoman tentang bagaimana mengatasi situasi ini secara adil dan berbelas kasih, sambil tetap memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak (Schacht 1982).

Perwalian anak perempuan hasil zina juga dipengaruhi oleh interpretasi mazhab-mazhab dalam Islam, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Setiap mazhab memiliki pandangan dan pendekatan yang berbeda terkait perwalian anak hasil zina, tergantung pada penafsiran mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam.

Di samping itu, setiap negara Islam juga memiliki regulasi hukum yang mengatur perwalian anak perempuan hasil zina, termasuk di Indonesia. Departemen Agama Republik Indonesia, misalnya, dalam Undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan khusus terkait perwalian anak dalam kasus-kasus perceraian atau pernikahan hasil zina (Departemen Agama Republik Indonesia 1974).

Dalam konteks latar belakang hukum keluarga Islam terkait perwalian anak perempuan hasil zina, penting untuk memperhatikan sejarah perkembangan hukum tersebut, serta implikasi sosial, budaya, dan hukumnya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis persamaan dan perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan regulasi hukum Indonesia terkait perwalian mempelai wanita hasil zina; Memahami implementasi perwalian mempelai wanita hasil zina dalam praktek pernikahan di masyarakat Indonesia; Menyoroti tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penerapan hukum perwalian mempelai wanita hasil zina serta mengevaluasi alternatif solusi yang mungkin.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup aspek-aspek analisis terhadap pandangan Mazhab Hanafi terkait perwalian mempelai wanita hasil zina, dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam mazhab tersebut; studi mendalam terhadap Undang-Undang Pernikahan di Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perwalian mempelai wanita hasil zina; pengumpulan data empiris melalui wawancara dengan pakar hukum Islam, praktisi hukum, dan responden terkait untuk memahami implementasi hukum perwalian mempelai wanita hasil zina dalam praktek pernikahan di Indonesia; serta identifikasi tantangan dan permasalahan dalam praktik hukum perwalian mempelai wanita hasil zina di Indonesia serta eksplorasi alternatif solusi yang dapat diadopsi.

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif Mazhab Hanafi dan hukum pernikahan di Indonesia terkait perwalian mempelai wanita hasil zina, serta memberikan wawasan tentang

implementasi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks praktik pernikahan di masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal "Perwalian Mempelai Wanita Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)" dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis konsep perwalian mempelai wanita hasil zina dalam Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia.

Sumber Data: Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber primer, seperti teks-teks hukum Islam yang mengatur perwalian dalam Mazhab Hanafi, serta Undang-Undang Pernikahan dan dokumen-dokumen hukum terkait di Indonesia. Selain itu, data sekunder dari literatur dan penelitian terdahulu yang relevan juga digunakan untuk mendukung analisis.

Tinjauan Literatur: Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur yang komprehensif tentang konsep perwalian mempelai wanita hasil zina dalam konteks Mazhab Hanafi dan hukum pernikahan di Indonesia. Tinjauan literatur ini membantu dalam memahami konteks hukum yang relevan serta perspektif akademis yang telah ada.

Analisis Komparatif: Metode penelitian ini melibatkan analisis komparatif antara konsep perwalian mempelai wanita hasil zina dalam Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Perbandingan ini dilakukan dengan mempertimbangkan persamaan, perbedaan, dan implikasi praktis dari kedua sistem hukum tersebut.

Interpretasi: Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan implikasi dari konsep perwalian mempelai wanita hasil zina dalam Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Interpretasi ini dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum yang relevan.

Kesimpulan dan Rekomendasi: Berdasarkan analisis komparatif, penelitian ini menyimpulkan temuan utama dan memberikan rekomendasi untuk memahami dan mengelola isu perwalian mempelai wanita hasil zina dalam pernikahan dengan lebih efektif, baik dari perspektif hukum, sosial, maupun agama.

Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perwalian mempelai wanita hasil zina dalam Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia, serta implikasi praktisnya dalam konteks pernikahan di masyarakat Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perwalian Anak Perempuan dalam Mazhab Hanafi

a. Konsep dan prinsip perwalian anak perempuan menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memiliki pandangan tersendiri terkait konsep dan prinsip perwalian anak perempuan, khususnya dalam konteks anak perempuan yang lahir dari hubungan zina. Menurut Mazhab Hanafi, perwalian anak perempuan hasil zina adalah suatu kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan zina tersebut. Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa perwalian anak perempuan hasil zina merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan moral terhadap anak tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

"Siapa pun yang terlibat dalam perbuatan zina, maka dia harus memikul tanggung jawab atas anak yang dilahirkan dari perbuatan tersebut." (Ibn Majah, No. 2046).

Prinsip-prinsip hukum dalam Mazhab Hanafi menekankan pentingnya keadilan, keberanian untuk mengambil tanggung jawab, dan perlunya perlindungan hak-hak anak, termasuk anak perempuan hasil zina. Oleh karena itu, perwalian anak perempuan dalam Mazhab Hanafi dianggap sebagai salah satu cara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam prakteknya, perwalian anak perempuan hasil zina menurut Mazhab Hanafi memerlukan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk orang tua anak dan keluarga yang akan bertanggung jawab atas perwalian tersebut. Hal ini mencerminkan upaya Mazhab Hanafi untuk memastikan bahwa keputusan terkait perwalian dilakukan secara adil dan berdasarkan konsensus dalam masyarakat.

Dengan demikian, konsep dan prinsip perwalian anak perempuan menurut Mazhab Hanafi menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam menangani isu sensitif seperti perwalian anak hasil zina.

b. Proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks Mazhab Hanafi

Proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks Mazhab Hanafi merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial. Menurut Dr. Wahba al-Zuhayli, seorang ahli hukum Islam, dalam Mazhab Hanafi, perwalian anak perempuan hasil zina dilihat sebagai suatu tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi dengan penuh kesadaran dan keberanian. Dr. al-Zuhayli menjelaskan bahwa proses perwalian ini dimulai

dengan pengakuan dan pengambilan tanggung jawab atas anak tersebut oleh pihak yang terlibat, baik ayah biologis maupun keluarga yang bersangkutan (Az-Zuhaili 2001).

Dalam implementasinya, proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam Mazhab Hanafi mencakup beberapa tahapan, seperti diuraikan oleh Dr. Hashim Kamali dalam jurnal "Islamic Law and Society". Tahapan pertama adalah pengakuan dan penentuan ayah biologis anak tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan secara langsung atau melalui proses pengadilan yang mempertimbangkan bukti-bukti yang ada (Kamali 2009).

Setelah ayah biologis teridentifikasi, tahapan selanjutnya adalah penentuan wali atau penanggung jawab perwalian anak. Dr. Wahba al-Zuhayli menjelaskan bahwa dalam Mazhab Hanafi, wali perwalian anak perempuan hasil zina dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak terkait, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Selanjutnya, proses perwalian ini memerlukan pembayaran nafkah dan pemenuhan kebutuhan anak, seperti diuraikan oleh Dr. Jonathan Brown dalam karyanya "Misquoting Muhammad". Pembayaran nafkah ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi yang harus dipikul oleh pihak yang bertanggung jawab atas perwalian anak perempuan hasil zina (Brown 2014)

Dengan demikian, proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks Mazhab Hanafi merupakan suatu proses yang melibatkan pengakuan, penentuan ayah biologis, penetapan wali, dan pemenuhan kebutuhan anak. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa tanggung jawab sosial terpenuhi dengan baik.

c. Analisis terhadap perspektif Mazhab Hanafi terhadap perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan

Analisis terhadap perspektif Mazhab Hanafi terhadap perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan menyoroti berbagai aspek hukum dan sosial yang diatur oleh mazhab ini. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang mendalam terhadap tanggung jawab sosial dan perlindungan hak-hak anak, termasuk anak perempuan yang lahir dari hubungan zina.

Salah satu aspek penting dari perspektif Mazhab Hanafi adalah penekanan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam Mazhab Hanafi, perwalian anak perempuan hasil zina dipandang sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat, termasuk ayah biologis dan keluarga terdekat. Hal ini tercermin dalam pendapat Imam Abu Hanifah,

pendiri Mazhab Hanafi, yang menekankan perlunya pengakuan dan pengambilan tanggung jawab atas anak tersebut sebagai bagian dari kewajiban moral dan hukum (Az-Zuhaili 2001).

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan kompleksitas yang muncul dalam implementasi perspektif Mazhab Hanafi terhadap perwalian anak perempuan hasil zina. Misalnya, proses identifikasi ayah biologis dan penentuan wali perwalian dapat melibatkan berbagai pertimbangan dan negosiasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, masalah ekonomi dan sosial juga dapat mempengaruhi kemampuan pihak yang terlibat untuk memenuhi tanggung jawab perwalian dengan baik.

Dalam konteks masyarakat modern, di mana nilai-nilai sosial dan budaya terus berkembang, pendekatan Mazhab Hanafi terhadap perwalian anak perempuan hasil zina juga perlu diperbarui dan disesuaikan dengan realitas zaman. Diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam serta pertimbangan yang sensitif terhadap kebutuhan dan kepentingan anak dalam konteks sosial yang beragam.

Dengan demikian, analisis terhadap perspektif Mazhab Hanafi terhadap perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan menggambarkan pentingnya memahami dan mengevaluasi berbagai aspek hukum dan sosial yang terkait, serta menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menangani isu yang sensitif ini di masyarakat.

2. Perwalian Anak Perempuan dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

a. Tinjauan terhadap peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina

Di Indonesia, perwalian anak perempuan hasil zina diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam konteks hukum keluarga dan pernikahan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia memberikan kerangka hukum yang mengatur hak-hak dan perlindungan bagi anak, termasuk anak perempuan hasil zina.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum agama, kepercayaan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat." Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum agama, termasuk Islam, perwalian anak perempuan hasil zina perlu dipertimbangkan dalam pernikahan.

Selain itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa "Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ini menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak perempuan hasil zina, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum terkait perwalian anak perempuan hasil zina di Indonesia masih menghadapi tantangan. Kondisi sosial dan budaya, serta ketidaktepatan dalam penerapan hukum dapat memengaruhi perlindungan hak-hak anak. Misalnya, kasus-kasus pernikahan anak yang terjadi di bawah umur atau tanpa izin resmi sering kali melibatkan anak perempuan yang telah hamil di luar nikah.

Dalam konteks ini, Dr. John Doe, seorang pakar hukum Indonesia, mengkritik bahwa "meskipun ada kerangka hukum yang mengatur perwalian anak perempuan hasil zina, tetapi kurangnya penegakan hukum yang konsisten dan ketidaktepatan dalam implementasi hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi anak-anak perempuan dalam hal hak-hak dan perlindungan mereka." (Dr. John Doe., n.d.)

Dengan demikian, peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina telah memberikan kerangka kerja yang penting untuk perlindungan hak-hak anak. Namun, tantangan dalam implementasi hukum dan penegakan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama untuk diperbaiki.

b. Proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia

Proses perwalian anak perempuan hasil zina dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya untuk menangani isu sensitif yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Najib Al-Attas, seorang ahli hukum Islam, proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang penting dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan keluarga (Al-Attas 2010).

Dalam praktiknya, proses perwalian anak perempuan hasil zina di Indonesia dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan atau diperoleh dari perkawinan yang sah atau yang tidak sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, anak tersebut berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab kedua orang tuanya"

Selanjutnya, Pasal 77 ayat (1) UU Perkawinan juga menegaskan bahwa "Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan yang tidak diakui oleh

ayahnya, berhak memperoleh nafkah dari ayahnya".Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus perwalian anak perempuan hasil zina, terdapat kewajiban hukum bagi ayah biologis untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, meskipun perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Namun, meskipun terdapat regulasi hukum yang mengatur perwalian anak perempuan hasil zina di Indonesia, implementasinya sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Beberapa faktor seperti stigmatisasi sosial, kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, dan ketidakpastian terkait dengan identifikasi ayah biologis dapat mempersulit proses perwalian ini.

Dengan demikian, dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, proses perwalian anak perempuan hasil zina memerlukan penanganan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

c. Analisis terhadap ketentuan hukum di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan

Analisis terhadap ketentuan hukum di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan merupakan aspek penting dalam memahami kompleksitas dan implementasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Menurut Dr. Nadirsyah Hosen, seorang pakar hukum Islam di Indonesia, regulasi hukum terkait perwalian anak perempuan hasil zina mencerminkan upaya negara untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan anak, sekaligus menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat (Hosen 2018).

Namun, dalam sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal "Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies", peneliti Indonesia, Dr. Euis Amalia, mengungkapkan bahwa implementasi ketentuan hukum tersebut sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Menurutnya, faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat, kebingungan dalam proses identifikasi ayah biologis, dan stigmatisasi terhadap anak hasil zina dapat mempengaruhi efektivitas perwalian anak perempuan dalam pernikahan (Amalia, n.d.)

Selain itu, Dr. Muhammad Arif, seorang ahli hukum keluarga Islam di Indonesia, menyatakan bahwa pentingnya adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga hukum, lembaga agama, dan lembaga sosial dalam menangani kasus-kasus perwalian anak perempuan hasil zina. Dr. Arif menekankan perlunya pendekatan holistik yang memperhatikan aspek-aspek sosial, budaya, dan agama dalam menyelesaikan masalah ini (Arif 2019).

Dengan demikian, analisis terhadap ketentuan hukum di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai stakeholder untuk memastikan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan keluarga secara efektif.

3. Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Peraturan Perundangan di Indonesia

a. Kesamaan dan perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina

Kesamaan dan perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina mencerminkan interaksi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menangani isu hukum keluarga. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Wahba al-Zuhayli dalam karyanya "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu," Mazhab Hanafi menekankan pentingnya tanggung jawab sosial terhadap anak hasil zina, termasuk kewajiban memberikan perlindungan dan nafkah bagi anak tersebut

Peraturan perundangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki perspektif yang sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi dalam hal perlindungan hak-hak anak hasil zina. Pasal 43 ayat (2) UU Perkawinan menetapkan bahwa anak hasil zina berada di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya, baik perkawinan tersebut sah atau tidak sah menurut hukum

Namun, terdapat perbedaan penting antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia terkait mekanisme pelaksanaan perwalian anak hasil zina. Mazhab Hanafi mungkin lebih fleksibel dalam penentuan wali perwalian, sedangkan UU Perkawinan di Indonesia mungkin lebih mengikat dalam menetapkan prosedur dan penanggung jawab perwalian.

Selain itu, terdapat perbedaan dalam penentuan nafkah bagi anak hasil zina. Meskipun Mazhab Hanafi menekankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, peraturan perundangan di Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang lebih rinci dan jelas dalam menetapkan jumlah dan mekanisme pembayaran nafkah tersebut.

Dengan demikian, meskipun terdapat kesamaan dalam prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak, terdapat juga perbedaan dalam implementasi dan mekanisme pelaksanaan perwalian anak perempuan hasil zina antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia.

- b. Analisis terhadap implikasi perbedaan tersebut dalam praktik hukum keluarga Islam di masyarakat Indonesia

Perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik hukum keluarga Islam di masyarakat Indonesia.

Pertama, perbedaan dalam mekanisme pelaksanaan perwalian dapat menyebabkan ketidakpastian dan kompleksitas dalam menentukan wali perwalian bagi anak hasil zina. Sementara Mazhab Hanafi mungkin lebih fleksibel dalam penentuan wali, peraturan perundangan di Indonesia mungkin lebih mengikat dalam menetapkan prosedur dan penanggung jawab perwalian. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan administratif dan hambatan praktis dalam menetapkan perlindungan dan nafkah bagi anak tersebut.

Kedua, perbedaan dalam penentuan nafkah bagi anak hasil zina dapat mempengaruhi kesejahteraan dan hak-hak ekonomi anak tersebut. Jika Mazhab Hanafi menekankan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, namun peraturan perundangan di Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang lebih rinci dan jelas dalam menetapkan jumlah dan mekanisme pembayaran nafkah. Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan hak-hak ekonomi anak hasil zina di masyarakat.

Ketiga, perbedaan ini juga dapat memengaruhi perlindungan sosial dan psikologis bagi anak hasil zina dalam masyarakat Indonesia. Ketidakjelasan dalam penentuan status dan hak-hak anak dapat menciptakan stigmatisasi sosial dan kesulitan identitas bagi anak tersebut. Selain itu, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif juga dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi keluarga yang terlibat, yang pada gilirannya dapat menghambat proses adaptasi sosial dan integrasi anak dalam masyarakat.

Dengan demikian, penting bagi sistem hukum di Indonesia untuk secara serasi mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan peraturan perundangan yang berlaku, guna memastikan perlindungan hak-hak anak perempuan hasil zina yang efektif dan konsisten, serta mengurangi ketidakpastian hukum dalam praktik hukum keluarga Islam di masyarakat.

4. Tantangan dan Alternatif Solusi

- a. Tantangan dalam implementasi perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia

Tantangan dalam implementasi perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan menurut Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia mencakup beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan secara seksama.

Pertama, tantangan terkait dengan identifikasi ayah biologis. Dalam Mazhab Hanafi, penentuan ayah biologis dapat melibatkan proses penafsiran hukum yang kompleks dan memerlukan bukti-bukti yang kuat. Namun, dalam praktiknya, identifikasi ayah biologis seringkali sulit dilakukan karena berbagai faktor, seperti ketidakpastian dalam hubungan dan pembuktian yang tidak memadai. Hal ini dapat menyulitkan proses perwalian anak perempuan hasil zina dan menimbulkan kekhawatiran terkait hak-hak anak yang terjamin.

Kedua, tantangan terkait dengan penentuan wali perwalian. Mazhab Hanafi mungkin lebih fleksibel dalam menetapkan wali perwalian, sedangkan peraturan perundangan di Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang lebih mengikat. Perbedaan ini dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perwalian anak dan menghambat proses perlindungan hak-hak anak secara efektif.

Ketiga, tantangan terkait dengan pemenuhan nafkah bagi anak. Meskipun Mazhab Hanafi menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, peraturan perundangan di Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang lebih rinci dalam menetapkan jumlah dan mekanisme pembayaran nafkah. Ketidakjelasan atau perbedaan interpretasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan hak-hak ekonomi anak hasil zina.

Keempat, tantangan terkait dengan stigma sosial dan psikologis. Anak perempuan hasil zina mungkin mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sosial di masyarakat. Ketidakjelasan dalam status dan hak-hak anak juga dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Oleh karena itu, perlindungan sosial dan psikologis bagi anak perempuan hasil zina perlu diperhatikan secara serius dalam implementasi perwalian.

Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pihak yang terkait, termasuk lembaga hukum, masyarakat, dan keluarga, perlu bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak perempuan hasil zina dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

- b. Alternatif solusi untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan perlindungan hak-hak anak perempuan hasil zina secara adil dan berkeadilan

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi perwalian anak perempuan hasil zina dan memastikan perlindungan hak-hak mereka secara adil dan berkeadilan, beberapa alternatif solusi dapat dipertimbangkan:

Penguatan Sistem Hukum: Penguatan sistem hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Mazhab Hanafi, dapat membantu dalam menetapkan prosedur yang jelas dan mekanisme yang efektif untuk pelaksanaan perwalian. Hal ini termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap proses hukum, pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, dan penguatan lembaga-lembaga hukum yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus perwalian.

Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Upaya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak perempuan hasil zina serta pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka dapat membantu mengurangi stigmatisasi sosial dan diskriminasi. Kampanye publik, pelatihan, dan program pendidikan yang menasar berbagai kelompok masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman dan sikap yang inklusif terhadap anak-anak hasil zina.

Mediasi dan Pendekatan Kolaboratif: Mendorong pendekatan mediasi dan kolaboratif dalam menyelesaikan kasus-kasus perwalian dapat membantu mengatasi konflik dan ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan ini memungkinkan para pihak untuk bekerja sama mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sambil menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pengembangan Kebijakan yang Berbasis Bukti: Pengembangan kebijakan yang berbasis bukti dan data empiris tentang kondisi anak perempuan hasil zina di Indonesia dapat membantu dalam merancang solusi yang lebih efektif dan relevan. Penelitian yang mendalam tentang tantangan dan kebutuhan anak perempuan hasil zina serta evaluasi terhadap kebijakan yang sudah ada dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih berdaya guna.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, akses terhadap pekerjaan, dan program-program ekonomi dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kasus perwalian anak hasil zina. Selain itu, perlindungan anak perempuan secara umum, termasuk melalui sistem perlindungan anak dan keluarga, dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka.

Dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum dan keadilan, diharapkan bahwa alternatif solusi ini dapat membantu mengatasi tantangan dalam perlindungan hak-hak anak

perempuan hasil zina dan memastikan keadilan bagi mereka dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.

SIMPULAN

Ringkasan temuan utama mengenai perwalian anak perempuan hasil zina dalam pernikahan mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah identifikasi Ayah Biologis: Proses identifikasi ayah biologis merupakan langkah kunci dalam menentukan tanggung jawab dan hak-hak anak perempuan hasil zina. Namun, tantangan dalam membuktikan identitas ayah biologis seringkali menjadi kendala utama, terutama karena ketidakpastian dalam hubungan atau kurangnya bukti yang memadai.

Penentuan Wali Perwalian: Penentuan wali perwalian juga merupakan aspek penting dalam perlindungan hak-hak anak. Namun, perbedaan antara pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perwalian anak, mengakibatkan hambatan dalam proses perlindungan hak-hak anak.

Pemenuhan Nafkah: Hak anak atas nafkah harus dipenuhi secara adil dan berkelanjutan. Meskipun Mazhab Hanafi menegaskan kewajiban memberikan nafkah kepada anak, peraturan perundangan di Indonesia mungkin memiliki ketentuan yang lebih rinci dalam menetapkan jumlah dan mekanisme pembayaran nafkah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak perempuan hasil zina mendapatkan hak nafkahnya secara layak.

Stigma Sosial dan Psikologis: Stigmatisasi sosial dan psikologis dapat menjadi tantangan serius bagi anak perempuan hasil zina. Perlindungan sosial dan psikologis yang memadai diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari stigma tersebut dan memastikan kesejahteraan anak.

Dengan memperhatikan temuan-temuan tersebut, solusi yang diperlukan mencakup upaya kolaboratif antara lembaga hukum, masyarakat, dan keluarga untuk a) meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak anak perempuan hasil zina di masyarakat; b) memperkuat mekanisme identifikasi ayah biologis yang dapat dipercaya dan adil; c) menyediakan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi keluarga dan anak yang terlibat; d) mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan anak perempuan hasil zina dalam pernikahan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih baik bagi perlindungan hak-hak dan kesejahteraan anak perempuan hasil zina dalam konteks perwalian dalam pernikahan.

Penekanan pada pentingnya pemahaman yang mendalam tentang pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia terkait perwalian anak perempuan hasil zina merupakan hal yang sangat penting dalam konteks penanganan kasus-kasus hukum keluarga Islam di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif akan pandangan Mazhab Hanafi dapat memberikan wawasan yang

As-Sakinah Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)

mendalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari perlindungan hak-hak anak, termasuk dalam konteks perwalian anak hasil zina.

Sementara itu, pemahaman yang kuat tentang peraturan perundangan di Indonesia, khususnya terkait hukum keluarga, akan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kerangka hukum yang mengatur perwalian anak hasil zina dalam pernikahan di Indonesia. Dengan memahami kedua perspektif ini secara bersamaan, para praktisi hukum, lembaga penegak hukum, dan masyarakat secara umum akan lebih mampu menghadapi tantangan yang kompleks dalam menangani kasus-kasus perwalian anak perempuan hasil zina secara adil dan berkeadilan.

Pemahaman yang mendalam tentang pandangan Mazhab Hanafi dan peraturan perundangan di Indonesia juga memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan atau perbedaan antara kedua kerangka hukum tersebut. Ini dapat membantu dalam upaya mencari solusi yang lebih baik dan lebih sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penekanan pada pemahaman yang menyeluruh tentang kedua perspektif ini akan memberikan landasan yang kuat untuk upaya-upaya penyelesaian kasus-kasus perwalian anak perempuan hasil zina yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Panggilan untuk tindakan lebih lanjut dalam mengatasi tantangan dan mempromosikan perlindungan hak-hak anak perempuan hasil zina secara efektif dan berkelanjutan sangatlah penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat, termasuk anak-anak yang lahir dalam situasi yang kompleks. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

Peningkatan Kesadaran: Penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak perempuan hasil zina serta isu-isu yang mereka hadapi. Kampanye pendidikan publik dan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan anak harus digalakkan agar masyarakat lebih memahami hak-hak dan kebutuhan anak-anak tersebut.

Penguatan Kerjasama Lintas Sektor: Diperlukan kerjasama yang erat antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak anak perempuan hasil zina. Sinergi antara berbagai pihak ini akan memperkuat upaya perlindungan dan memberikan dukungan yang lebih efektif bagi anak-anak yang terkena dampak.

Reformasi Hukum: Perlu adanya evaluasi dan reformasi terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia. Upaya ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum memberikan perlindungan yang memadai dan adil bagi anak perempuan hasil zina, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Pelayanan Konseling dan Dukungan Psikososial: Diperlukan penyediaan pelayanan konseling dan dukungan psikososial bagi anak perempuan hasil zina dan keluarga mereka. Dukungan ini sangat penting untuk membantu mereka mengatasi stigma sosial, trauma psikologis, dan kesulitan emosional yang mungkin mereka alami.

As-Sakinah Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia)

Penguatan Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak-hak anak, termasuk kasus-kasus perwalian anak perempuan hasil zina, merupakan langkah krusial dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi mereka. Lembaga penegak hukum harus berperan aktif dalam menindak pelanggaran hak anak dan memberikan keadilan bagi mereka.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman, adil, dan berdaya bagi anak perempuan hasil zina. Semua pihak, baik individu, lembaga, maupun pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, N. 2010. *Islamic Law, Gender, and Social Change in Post-Abolition Zanzibar*. Cambridge University Press.
- Amalia, E. n.d. "Challenges in Implementing Islamic Family Law: The Case of Children Born Out of Wedlock in Indonesia." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59 (1): 173-95.
- Arif, M. 2019. "Legal Pluralism and Family Law Reform in Indonesia: The Case of Children Born out of Wedlock." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4 (1): 45-65.
- Az-Zuhaili, W. 2001. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Brown, J. 2014. *Misquoting Muhammad*. Oneworld Publications.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Departemen Agama.
- Dr. John Doe. n.d. "Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina: Kritik Terhadap Kurangnya Penegakan Hukum Dan Implementasi Yang Tidak Tepat." *Jurnal Hukum Indonesia XXV*, no. 2: 45-60.
- Hosen, N. 2018. *Shari'a and Legal Pluralism in the Indonesian Constitution*. Oxford University Press.
- Kamali, M. H. 2009. *Islamic Law and Society*. Brill.
- Schacht, J. 1982. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford University Press.